

**“Skizofrenia”: Calon Bupati dan Wakil Bupati
Sumba Barat Daya - Provinsi NTT
Oleh: D. Tiala *)**

KALIMAT bergerak dalam waktu, sehingga membuat seseorang memperoleh pengalaman waktu secara konkret dan langsung. Pater Moses Beding, CSsR (almarhum), menulis sebuah artikel dengan judul “Pengalaman dengan Waktu dan Kefanaan” (Yogyakarta, 11 Januari 2007). Dalam renungannya, beliau mengatakan: “Hidup manusia tidak dapat dibayangkan tanpa lewat dan datangnya waktu, kita mengalami waktu dan pengalaman ini menyentuh hakikat terdalam hidup kita. Tidak seorangpun luput dari waktu. Paling lambat pada saat ajal, kita akan merasa bahwa waktu kita sudah selesai. Sudah tamatlah semua waktu untuk kita.” Ada kecenderungan seseorang calon bupati dan wakil bupati penderita skizofrenia tak memahami artikulasi bahasa seperti di atas dan seorang skizofrenik tak memiliki pengalaman kontinuitas waktu sehingga ditakdir untuk **hidup dalam masa kini abadi**, tak mengerti masa lalu dan masa depannya. Jadi, mereka tidak memiliki identitas pribadi. Renungan di atas, sangat membantu untuk melangkah, bersikap dan menata hidup untuk tidak terlalu percaya diri.

Sejumlah informasi yang beredar, kian merambah bumi persada tanah Marapu yang memberitakan tentang munculnya berbagai nama calon bupati dan wakil bupati (baik yang sudah berpasangan maupun yang masih mencari pasangan, bahkan cenderung paranoid) dapat dilukiskan, sedang berada sebagai penderita penyakit kejiwaan skizofrenia. Informasi itu, mengingatkan saya pada dua hal. *Pertama*, esai Fredric Jameson, salah seorang pemikir postmodernisme dalam bukunya yang berjudul "*Postmodernism and Consumer Society*" yang membahas *pastiche* dan *scizofrenic* dalam postmodernisme. *Kedua*, pernyataan awal (2004) Megawati Soekarnoputri, yang ketika itu menjadi pemimpin utama negeri ini dan kini masih menjadi bosnya partai berlambang banteng gemuk dengan bibir putih alias PDIP, menyatakan bahwa “kenyataannya tak mudah memilih pemimpin berkualitas”. Jadi, kata kunci dari pernyataan itu ada pada “kualitas”, karena itu semangat ini haruslah pula direpson oleh para pemimpin PDIP mulai dari pusat sampai ke daerah. Dalam kamus politik, seharusnya partai politik berfungsi sebagai “penyalur suara dan aspirasi rakyat” karena itu perlu dilakukan semacam “*public hearing*” dalam memunculkan nama-nama calon bupati dan wakil bupati.

Menghindari Salah Tafsir

Tulisan ini tidak bermaksud membahas skizofrenia dari sisi psikoanalisis, pun pula tidak menelaah kode etik yang diterabas oleh seluruh Kepala RS Jiwa di Indonesia dengan "membocorkan" hasil pemeriksaan kesehatan seseorang kepada publik. Tetapi, tulisan ini lebih melihat **teori skizofrenia dalam tatanan budaya - politik**, terutama yang dikaitkan dengan upaya mencari seorang pemimpin yang berkualitas untuk membangun kabupaten hasil pemekaran secara komprehensif.

Dalam esai Fredric Jameson (dari buku *The Anti-Aesthetic Essays on Postmodern Culture*, 1985), Jameson yang mengutip Jacques Lacan menyebutkan, skizofrenia pada dasarnya adalah kekacauan bahasa. Lacan menilai pengalaman temporalitas, waktu, masa lalu, masa kini, memori, berlanjutnya identitas pribadi atas bulan dan tahun adalah juga sebuah efek dari bahasa. Argumen yang dibangun cukup sederhana: "kalimat bergerak dalam waktu", sehingga seseorang memperoleh pengalaman waktu secara konkret dan langsung. Jameson menegaskan, seorang skizofrenik tidak hanya, "bukan siapa-siapa", dalam arti bukan sekadar tak memiliki identitas pribadi, melainkan juga tak berbuat apa-apa. Tetapi, untuk orang-orang yang sehat mereka mempunyai rencana berarti dan ia harus mampu melibatkan diri kepada kontinuitas tertentu atas waktu. Kembali pada renungan Pater Moses Beding, CSsR (almarhum) : "Kalau saya punya waktu untuk seseorang yang lain, maka saya membuat dia hidup, bernafas; saya membuat dia berkembang. Kita dapat menikmati waktu di mana kita saling memberi....Barangsiapa yang tidak mengambil waktu untuk dirinya, maka ia menjadi lumpuh dan melumpuhkan orang lain".

Dari Jameson ke Megawati Soekarnoputri

Dalam pidato pergantian tahun (2003 ke 2004), Megawati secara jujur mengakui tidak mudah menemukan pemimpin "berkualitas". Meski begitu, bukan berarti rakyat menanggalkan hak pilihnya. Hanya bila pilihan telah ditetapkan, rakyat terikat pada kebijakan nasional dan daerah yang akan dibuatnya dalam lembaga legislatif dan eksekutif. Karena itu, lanjut Megawati, sejak saat ini masyarakat hendaknya menelaah riwayat hidup para calon yang akan duduk di lembaga legislatif dan eksekutif. Intinya Megawati ingin mengatakan "bercerminlah pada pemilu-pemilu sebelumnya, jangan keliru memilih pemimpin".

Untuk pilihan kepala daerah, masyarakat harus cerdas memilih pemimpin, jangan memilih pemimpin ketika dalam kampanye menebar janji-janji politik yang kosong (cermati janji kampanye pemilihan kepala daerah Sumba Barat), jangan memilih pemimpin yang tidak dapat berbuat untuk kemajuan masyarakat di wilayah itu (cermati pemimpin yang pandai beretorika, yang lebih senang melakukan studi banding ke luar negeri), jangan memilih pemimpin di mana kekuasaan sebagai tujuan. Lord Action, mengatakan bahwa kekuasaan itu cenderung korup. Kecenderungan menjadikan kekuasaan sebagai tujuan akan dapat menimbulkan korupsi. Saratri Wilonoyudho, bilang: Korupsi setidaknya bermotif ganda, yakni motif memperkaya diri (*material corruption*), dan mempertahankan diri (*political corruption*).

Mencari Keterkaitan

Teori Jameson dan pernyataan Megawati memang berdiri sendiri. Dalam konteks tulisan ini, sebenarnya bisa ditarik keterkaitannya. Secara sederhana dapat dijelaskan demikian: pemilihan kepala daerah langsung merupakan saat yang tepat untuk memilih seorang bupati dan wakil bupati secara benar sehingga kelak diperoleh seorang pemimpin yang berkualitas. Namun pada sisi lain calon yang ditawarkan parpol, sebagian

sudah menunjukkan tanda tak berkualitas. Dengan kondisi ini muncul pertanyaan, mengapa mereka bisa lolos? Sepatutnya dipertanyakan model perekrutan calon ini. Bukan lagi menjadi rahasia bahwa perekrutan calon ini disertai kebijakan "pungutan" atau dengan bahasa halus, kontribusi buat partai (bahkan amplop untuk oknum-oknum tertentu). Ini bisa dimaklumi, sebab tidak semua parpol kaya, tidak sedikit yang kelimpungan cari dana untuk bisa berkampanye nanti.

Gejala ini yang membuat "siapa punya uang, dialah berpeluang menjadi calon" dan urusan kualitas belakangan. Jangan bicara idealisme di sini, justru mesti memafhumi kapitalisme. Perjuangan demi rakyat yang selalu didengungkan dalam safari kampanye dikesampingkan. Tujuan utama duduk di lembaga ini adalah "bekerja demi gengsi" dan jabatan adalah jenis "pekerjaan" yang cepat mendatangkan uang. Calon itu berhitung, jika dia telah mengeluarkan uang sejumlah 50, dia mesti memperoleh 100, 200, atau bahkan berlipat-lipat ganda selama duduk sebagai orang nomor satu dan dua di kabupaten. Prinsip ini lagi-lagi mempercepat tumbuhnya budaya korupsi di jabatannya sebagai jenis pekerjaan.

Apa yang bisa diharapkan dari pemimpin yang nota bene sebagai penderita skizofrenia - mereka yang tanpa identitas diri, tanpa berbuat apa-apa, dan tanpa melihat masa lalu demi masa depan? Sosok macam ini akan sulit menunjukkan etos kerja yang tinggi. Ia bukan menjadi cermin jernih bagi masyarakat, melainkan malah membebani masyarakat. Padahal untuk mencegah masyarakat menjadi benar-benar hancur dan sungguh diberdayakan, salah satunya adalah mendongkrak etos kerja. Makna etos kerja di sini tetaplah bermuara pada kepentingan rakyat banyak. Etos kerja yang dimaksud bukan demi memompa semangat mengumpulkan kekayaan pribadi. Etos kerja yang rendah dan korupsi yang merajalela, diprediksi bakal membuat masyarakat bakal kian tertinggal jauh dibandingkan dengan masyarakat kabupaten lain di kawasan Nusa Tenggara Timur. Karena itu, kunci untuk menangkal prediksi tersebut maka seorang pemimpin harus mampu meningkatkan etos kerja dan memberantas praktik korupsi.

Pemilihan kepala daerah Sumba Barat Daya, yang direncanakan berlangsung tahun 2008, merupakan titik nadir kebangkitan warga masyarakat. Lewat sebuah pesta demokrasi, masyarakat berkesempatan untuk memilih pemimpin yang tepat, yang peduli terhadap masyarakat, yang setia pada janji-janji politiknya dalam kampanye, yang tidak menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri, yang terlalu percaya diri, sementara banyak dari rencana program yang belum dituntaskan. Sudah saatnya kesadaran politik masyarakat bangkit untuk tidak terbujuk janji kampanye menggiurkan. Walahualam!!!

*) Penulis adalah dosen Universitas Negeri Yogyakarta, kini sedang "*shopping*" pada Program Magister, Konsentrasi Kajian Budaya, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, Tahun 2007.